



Buletin

# Parlementaria

Nomor 1022/IV/VIII/2018 • Agustus 2018



**DPR Berharap  
Asian Games 2018  
Rekatkan Persaudaraan Asia**



**BUMN Perbankan Seharusnya Jadi Agen Pembangunan**



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan api obor Asian Games 2018 kepada Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto disaksikan sejumlah Anggota DPR RI dan Pejabat Setjen dan BK DPR RI

## DPR Berharap Asian Games 2018 Rekatkan Persaudaraan Asia

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap penyelenggaraan Asian Games 2018 dapat dijadikan sebagai momentum bersama dalam menciptakan perdamaian dunia. Asian Games 2018 harus dijadikan spirit bagi negara-negara Asia dalam merekatkan persaudaraan. Sehingga, bisa menjembatani dalam mengatasi krisis sosial, politik, maupun ekonomi akibat konflik dan permasalahan di berbagai belahan dunia.**

“Mari kita tunjukkan bahwa Asian Games memiliki filosofi mendalam yang mencerminkan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani, serta mengharmonikan antara keolahragaan, kebudayaan, dan persaudaraan antar bangsa. Olahraga mengajarkan kita untuk sportif, saling menghargai dan menghormati. Sehingga, mampu menjadi



Foto: Azka/hr

mercusuar bagi perdamaian dunia,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, usai menerima api obor Asian Games dalam rangkaian torch relay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8).

Sebelum dibawa ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan untuk digunakan dalam opening ceremony Asian Games 2018, api obor yang telah mengelilingi Indonesia ini diserahkan terlebih dahulu oleh petinju Chris John kepada Bamsuet di Kompleks Parlemen.

Selanjutnya oleh Bamsuet, api obor diserahkan kepada Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto untuk dibawa ke pintu gerbang DPR RI (gerbang Jalan Gatot Soebroto, RED), dan kemudian diserahkan kepada Anggota DPR RI Bara K. Hasibuan yang akan membawa api obor sampai Gedung Manggala Wanabakti untuk acara torch

relay selanjutnya.

“Dalam proses penyelenggaraan Asian Games 2018, DPR RI telah memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Baik dari segi penyediaan anggaran, maupun dalam membantu koordinasi antar berbagai pihak. Kami juga menyiapkan lahan di DPR RI sebagai tempat parkir kendaraan bus bagi atlet maupun official tim. Sesuai prinsip kerja Presiden Jokowi, kita Kerja Bersama,” terang Bamsuet.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan kepada para seluruh atlet maupun official tim yang sebentar lagi akan disibukkan dengan pertandingan,

**Jika fokus hanya sekadar menang dan kalah, maka yang akan ditampilkan adalah perilaku ketidakjujuran ataupun perilaku amoral lainnya. Olahraga seperti Asian Games harus menjadi instrumen membentuk karakter, baik individu pribadi maupun sebuah bangsa**

agar mengedepankan sikap persaudaraan dan sportifitas. Olahraga jangan direduksi menjadi sekadar persoalan menang dan kalah.

“Jika fokus hanya sekadar menang dan kalah, maka yang akan ditampilkan adalah perilaku ketidakjujuran ataupun perilaku amoral lainnya. Olahraga seperti Asian Games harus menjadi instrumen membentuk karakter, baik individu pribadi maupun sebuah bangsa,” papar Bamsuet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini tak lupa meminta seluruh masyarakat Indonesia selalu memberikan doa dan dukungan bagi para atlet Indonesia yang akan berjuang dalam pertandingan. Terlepas dari menang atau kalah, para atlet nasional Indonesia merupakan pejuang bangsa yang tak boleh dibiarkan berjuang sendirian.

“Jangan biarkan para atlet Indonesia berjuang sendirian. Mari kita berikan doa dan dukungan. Dan yang tak kalah penting, sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games, kita juga harus tunjukkan dan perlihatkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa beradab dengan memuliakan para tamu yang datang,” pungkas Bamsuet. ■ eps/sf



18th ASIAN GAMES  
**Jakarta Palembang 2018**



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadilah, Gerald Opie  
**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

**PENERBITAN**

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Reformasi Dana Haji Diharap Minimalisir Masalah Rutin Pelaksanaan Haji

**Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap, dengan adanya reformasi pengelolaan dana haji, maka masalah-masalah rutin terkait pelaksanaan haji dapat diminimalisir. Ia berpesan kepada pemerintah, dana tersebut merupakan milik umat, sehingga harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan berkualitas.**

**D**emikian dikatakan Fahri saat memimpin

Tim Pengawas (Timwas) Haji bersama Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon dalam acara 'Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina' di Hotel Al Wehdah Tower, Jarwal, Mekkah, Rabu (15/8). Turut ikut dalam rombongan, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, sejumlah Anggota Dewan lain, dan Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memimpin Tim Pengawas (Timwas) Haji bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam acara 'Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina' di Mekkah

Foto: Dok/hr

“Dengan

demikian, semoga tidak ada lagi kecelakaan kendaraan, karena jemaah haji kita mendapat fasilitas kendaraan terbaik. Tidak ada lagi jemaah yg mengeluh kekurangan makanan. Dan jemaah yg sakit mendapat pelayanan kesehatan terbaik,” tutur Fahri.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu memastikan, DPR RI melalui Timwas Haji, secara rutin telah memantau dan mengupayakan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan haji, baik dari aspek regulasi maupun teknis di lapangan. Rintisan perbaikan ini terus dilakukan.

Upaya perbaikan aspek regulasi antara lain dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Thn 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Haji, sebagai penyempurna UU Nomor 13 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Fahri berharap, dengan adanya payung hukum itu, dana haji dikelola secara lebih profesional.

“Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, pada 26 juli 2017 lalu telah dibentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan munculnya badan tersebut, pengelolaan dana haji secara struktural terpisah dari Kementerian Agama. Lebih independen karena langsung bertanggungjawab kepada Presiden,” ujar Fahri.

Politisi dapil NTB itu menilai bahwa dengan jumlah jemaah haji yang besar, maka dana yang terkapisasi juga besar.

Maka menurutnya harus digunakan secara tepat untuk melebihi kualitas pelayanan haji negara lain.

“Inilah mimpi dan harapan kita semua, khususnya jemaah haji. Ke depan, BPKH sebagai pelaksana haji dapat merancang banyak hal lain, seperti mempercepat antrean, menyiapkan manasik secara lebih bermakna, membangun kampung Indonesia di tanah suci dan terlibat dalam investasi haji di tanah suci,” harap Fahri.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyatakan kehadiran DPR RI di Arab Saudi juga merupakan bentuk kerja nyata dari sisi pengawasan. Dari pengawasan itu, menurut politisi PAN itu, pelayanan terhadap jemaah bisa dimaksimalkan. ■eps/sf

# DPR Pastikan Pelayanan Jemaah Haji Indonesia Berjalan Baik

**Tim Pengawas (Timwas) Haji yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bertemu dengan ratusan petugas haji dari Indonesia di Mekkah, Arab Saudi. Delegasi DPR RI ingin memastikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik.**

Selain unsur Pimpinan, delegasi DPR juga diikuti oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily serta sejumlah Anggota Dewan lainnya. Acara 'Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina' itu dilaksanakan di Hotel Al Wehdah Tower, Jarwal, Mekkah, Rabu (15/8).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu meminta agar jemaah haji Indonesia yang notabene adalah rombongan jemaah haji terbesar dilayani dengan baik agar mereka merasa seperti di Tanah Air.

"Perlu agar jemaah bisa merasa seperti di rumah sendiri. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan kuota menjadi 250 ribu jemaah. Karena antrean di Tanah Air begitu banyak," ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, menjadi petugas haji tidaklah mudah, karena mereka harus melayani ribuan jemaah dengan latar belakang yang cukup heterogen. Ia mendorong petugas haji tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.

"Tentu ini pekerjaan yang sulit, karena seringkali pengetahuan dan juga adaptasi terhadap jemaah haji yang didampingi. Kita berharap para petugas haji tetap semangat serta bisa melindungi dan betul-betul bisa melayani seluruh jemaah haji kita yang jumlahnya 221 ribu orang," harap Fadli.

Pelaksanaan pengawasan ini untuk memastikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seperti akomodasi, transportasi, katering dan kesehatan berjalan

dengan sebaik-baiknya. Delegasi DPR RI mendengarkan, mengumpulkan informasi dan data tentang permasalahan penyelenggaraan ibadah haji sehingga nanti bias merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun depan.

Delegasi DPR RI juga menyempatkan

bertemu dengan jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Masjidil Haram. Fadli meminta seluruh jemaah haji tetap menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah. Ia berharap, jemaah haji Indonesia selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan dalam beribadah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menambahkan bahwasanya kehadiran delegasi DPR di Arab Saudi juga merupakan bentuk kerja nyata dari sisi pengawasan. Dari pengawasan itu, menurut politisi PAN itu, pelayanan terhadap jemaah bisa dimaksimalkan.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memimpin Tim Pengawas (Timwas) Haji dalam 'Konsolidasi Petugas Haji untuk Persiapan Armina' di Mekkah

Foto: Dok/Pr

**Menjadi petugas haji tidaklah mudah, karena mereka harus melayani ribuan jemaah dengan latar belakang yang cukup heterogen. Ia mendorong petugas haji tetap semangat dalam menjalankan tugasnya.**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Delegasi DPR RI bertemu langsung dengan pihak penyelenggara pelaksanaan haji, diantaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali. Ikut hadir pula Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh. ■ es/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai memimpin Upacara HUT ke-73 Kemerdekaan RI di Gedung DPR RI

Foto: Andri/hr

## Ketua DPR Ajak Masyarakat Ikuti Semangat Para Pejuang

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap seluruh anak bangsa bisa mengikuti semangat para pejuang terdahulu yang telah bersusah payah memerdekakan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan Indonesia harus dijadikan bahan refleksi terhadap perjalanan bangsa yang telah merdeka.**

“Harapan saya seluruh rakyat Indonesia agar kembali melakukan refleksi terhadap perjalanan bangsa ini. Dan, mengambil semangat para

pejuang kita, para pendiri bangsa ini memerdekakan bangsa kita,” ujar Bamsuet, sapaan akrabnya, saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-73 RI di

Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/8).

Upacara yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan DPR RI itu, Bamsuet mengenakan baju adat Betawi. Seluruh peserta tampak khidmat mengikuti jalannya upacara tersebut.

Dalam pidatonya, Bamsuet mengajak seluruh komponen bangsa untuk

menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan lainnya. Para elit dan anak bangsa juga diminta agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jauhkan dari sikap saling fitnah, saling menyerang dan memecah belah bangsa. Jauhkan semua sifat dan sikap tersebut karena kita bangsa yang besar. Kalau bukan kita, siapa yang akan menjaga keutuhan bangsa ini,” kata Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini menyadari, dalam realitasnya menjaga kesatuan dan persatuan sangatlah tidak mudah.

Seringkali kepentingan-kepentingan sekelompok orang maupun golongan menjadi penghambatnya.

“Ingatlah, mereka yang hanya mementingkan kelompok maupun golongannya saja, lalu dengan teganya mengorbankan saudara-saudara sebangsa lainnya, tak ubahnya seperti penghianat bangsa. Mereka adalah musuh bagi kemerdekaan. Jangan sampai kita terjerumus. Kita harus menjadi bangsa yang solid,” tegas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga meminta para wakil rakyat

dan pegawai DPR RI untuk tetap semangat dalam bekerja dalam melayani kepentingan rakyat. Jangan sampai tahun politik justru menurunkan semangat dan kinerja para anggota dewan.

“Saya tegaskan di tahun politik ini kinerja DPR tidak boleh menurun karena para wakil rakyatnya sibuk berkampanye di daerah. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan hingga akhir masa jabatan tahun depan. Yang di DPR teruslah bekerja demi kepentingan rakyat. Begitu pula dengan yang di pemerintah,” pungkas Bamsoet. ■ ann/sf

## DPR Kian Terbuka dengan Kritik

**DPR RI sebagai lembaga kian terbuka dengan kritik. Masyarakat sipil bebas menyampaikan kritiknya tanpa perlu takut terancam. DPR RI ingin meyakinkan publik bahwa tidak anti-kritik dan kebal hukum seperti dituduhkan selama ini. Lewat aksi komedi pun, kritik bisa disampaikan kepada DPR RI.**

**K**etua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Lomba *Stand Up Comedy* bertajuk “Kritik DPR” di lobi Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8) menyampaikan, Presiden keempat Indonesia Gus Dur pernah mengatakan bahwa DPR RI mirip taman kanak-kanak. Namun kini diharapkan DPR RI menjadi taman cendekiawan dan intelektual. DPR RI bisa naik kelas dengan kritik. Inilah yang menjadikan Lembaga Legislatif ini kian matang dan maju.

Setidaknya ada 50 peserta komika yang terseleksi dari seratusan pendaftar. Para komika sengaja dihadirkan agar masyarakat bebas mengkritik DPR RI dalam berbagai ekspresi. “Silakan kami dikritik, karena DPR RI sangat butuh kritik. Dengan kritik, kita bisa memulai perbaikan,” ucap Bamsoet, sapaan akrabnya.



Foto: Arif/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat membuka Lomba *Stand Up Comedy* bertajuk “Kritik DPR”

Satu per satu komika tampil penuh jenaka dengan sentilan dan kritik sosial terhadap DPR RI selama tiga menit. Lobi Gedung Nusantara II DPR RI yang dipenuhi penonton pun terhibur dengan ocehan para komika. Lomba *Stand Up Comedy* ini, kata Bamsoet, digelar untuk memeriahkan HUT ke-73 DPR RI. Masih banyak rangkaian perlombaan lainnya sepanjang bulan Agustus dan September ini.

Hadir dalam acara ini, Anggota DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, panitia seleksi *stand up comedy* Effendi Gazali, Iwel Sastra, dan para pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Untuk memeriahkan suasana, Saut memainkan saksofonnya dengan membawakan lagu *Fix You* dari Coldplay. ■ mh/sf

# Menteri Tak Hadir, Rapat Kosultasi RUU Kewirausahaan Nasional Ditunda



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang akan membahas hal-hal yang masih *pending* dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan Nasional, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/8), akhirnya ditunda. Penundaan dilakukan karena menteri yang mestinya hadir dalam rapat ini, hanya diwakili oleh pejabat eselon I.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yang memimpin acara rapat konsultasi ini menyampaikan permintaan maafnya, dan menutup rapat untuk bisa diagendakan lagi. "Kami mohon maaf rapat tidak bisa dilanjutkan dan perlu diagendakan kembali. Mestinya yang hadir adalah menteri, sesuai ketentuan untuk mengambil keputusan penting ini," katanya sambil menutup rapat.

Rapat konsultasi ini seharusnya menghadirkan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Menteri Perindustrian, dan Menteri Hukum dan

HAM. Namun hingga rapat dimulai, hanya dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Dirjen Industri Kecil dan Menengah, serta Dirjen dari Kemenkumham.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Kewirausahaan Nasional Andreas Eddy Susetyo menjelaskan, rapat selanjutnya akan diagendakan kembali dengan menghadirkan menteri. Semula rapat konsultasi ini dimaksudkan untuk mengambil keputusan hal-hal yang masih *pending* dalam RUU Kewirausahaan Nasional ini, sehingga bisa segera diselesaikan.

## Pemerintah Harus Hati-hati Tetapkan Status Bencana

**Polemik status bencana Lombok menjadi perbincangan hangat publik. Gempa berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu hingga kini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, pemerintah disarankan berhati-hati dalam penetapan tersebut.**

di Indonesia juga tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Ia mencontohkan, ketika terjadi gempa di Yogyakarta tahun 2006, Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono tidak menetapkannya sebagai bencana nasional,

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk "Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok. Duka Indonesia?" di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8). Hadir pula sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis dan pengamat sosial ekonomi Johanes Saragih.

Menurut Masinton belum ada regulasi yang jelas bagaimana menetapkan suatu bencana menjadi bencana nasional. Banyak kasus gempa



Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis dan pengamat sosial ekonomi Johanes Saragih dalam Forum Legislasi "Regulasi Pengawasan dan Penanganan Bencana Lombok, Duka Indonesia?"

Dia berharap RUU ini bisa segera disahkan dalam rapat Pansus, untuk selanjutnya dibawa ke Tingkat II/ Pengambilan Keputusan di Rapat Paripurna. Sejauh ini, kata Andreas, pembahasan sudah sampai pada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) tapi ada beberapa hal yang masih *pending*. “Justru itulah, melalui Rapat Konsultasi ini diharapkan akan menyelesaikan hal-hal yang *pending*,” katanya.

Salah satu hal krusial yang di-*pending* adalah soal kelembagaan. DPR RI, kata politisi PDI Perjuangan itu, menginginkan ada kelembagaan yang lebih fokus menangani kewirausahaan ini. Pasalnya berpercarnya terlalu banyak lembaga yang menangani kewirausahaan justru kurang efektif.

Selain itu, sesuai masukan dari kalangan dunia usaha, untuk menaikkan kelas usaha mikro ini diperlukan suatu perlakuan khusus insentif. “Berdasarkan UU UMKM yang ada sekarang itu definisi kelompok usaha menengah ini *range*-nya terlalu lebar, omsetnya Rp2,5 hingga Rp5 miliar. Inilah yang membuat kurang efektif,” ia menambahkan. ■ mp/sf

walau korban jiwa cukup banyak.

“Yang penting negara hadir memberi perhatian kepada warga terdampak. Kita harus meletakkan suatu bencana dari sisi kemanusiaan dahulu, bukan aspek politiknya. Ini untuk meminimalisir korban kemanusiaan,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Untuk menilai penanganan bencana, sambung Masinton, harus dilihat dari cepat atau tidaknya pemerintah menangani bencana, bukan pada penetapan status bencananya. Sejauh ini, nilai Masinton, pemerintah sudah cukup tanggap menangani bencana gempa di Lombok.

Walau saat ini belum ada penetapan status bencana nasional, tapi bantuan mengalir dari dunia internasional. Ini bentuk penanganan dan informasi yang disampaikan pemerintah cukup efektif. “Sekarang yang penting bagaimana pemerintah memberi jaminan hidup dan jaminan keamanan. Tidak usah buru-buru tetapkan bencana nasional. Kesiapsiagaan lebih penting,” ujar politisi dapil DKI Jakarta itu. ■ mh/sf

# Pemerintah Tidak Tanggap Bencana

**Bencana gempa secara beruntun yang menimpa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menimbulkan kerusakan luas dan korban jiwa. Ironisnya, pemerintah belum juga menetapkan kondisi tersebut sebagai bencana nasional. Pemerintah pun dinilai tidak peka atas penderitaan masyarakat setempat dan tidak tanggap terhadap bencana tersebut.**

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai, kerusakan yang paling luas adalah infrastruktur.

Tidak saja rumah-rumah dan fasilitas umum, jalan-jalan penghubung juga mengalami kerusakan parah. Bandara dan pelabuhan ikut mengalami kerusakan. Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Pemerintah wajib menetapkan bencana gempa Lombok ini sebagai bencana nasional. Wilayah Lombok Timur dan Lombok Utara lumpuh. Pemda tak bisa berbuat banyak. Kerugian ekonomi sosial

keterbatasan,” keluh Bambang kepada Parlemen lewat sambungan telepon, Selasa (21/8).

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sudah mengamanatkan agar pemerintah segera menetapkan tragedi Lombok sebagai bencana nasional sesuai indikator yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007. Indikator sebagai bencana nasional di Lombok sudah terpenuhi seperti jumlah korban yang banyak, kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, dan cakupan luasnya wilayah yang terkena bencana. Hingga saat ini Perpres yang menetapkan status bencana nasional itu belum terbit.

Ditambahkan Bambang, yang juga memprihatinkan adalah evakuasi para turis asing dari Pulau Gili hanya menggunakan perahu kelotok milik warga. Penanganan evakuasi semacam ini, nilai politisi Partai Gerindra itu, sangat primitif. Di sisi lain, pelibatan TNI dalam membantu para korban juga masih minim. Padahal, dalam kasus kebakaran hutan yang tidak ada korban jiwa saja, pelibatan TNI sangat maksimal.

Dalam kasus bencana Lombok, sambung Bambang, pemerintah dinilai tidak punya perikemanusiaan. Bahkan, menteri-menteri juga dinilai asal bicara dan tak mengerti aturan hukum. “Menteri tak usah *ngomong* kalau tak *ngerti* aturan, terutama para menteri yang sedang sibuk menjadi caleg tahun depan,” ucap politisi dapil Jatim I ini.

Menurutnya, Lombok harus di-*protect* keselamatannya secara baik. Satu saja nyawa manusia hilang, nilainya tak terhingga. Pemerintah tidak serius tangani bencana ini. Padahal, Bali dan Lombok sebagai ikon pariwisata nasional bisa rusak akibat penanganan bencana yang tidak serius ini. ■ mh/sf



Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono

Foto: Jaka/hr

terutama sektor pariwisata paling terdampak. Wisatawan asing pun bisa kapok datang ke Lombok lagi, bila penanganan bencananya seperti ini. Selama ini pemerintah pusat hanya menyerahkannya kepada Pemda setempat. Padahal, pemda punya

# Jelang Pemilu 2019, Komisi II Tetap Fokus Jalankan Fungsinya

**Pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, yakni Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif diyakini Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali tidak akan mengendurkan semangat Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.**

Seperti diketahui, lebih dari setengah Anggota DPR RI saat ini kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif periode 2019-2024. Tentu saja anggota tersebut sedang berupaya di dapilnya masing-masing agar kembali terpilih.

“Rapat kerja akan tetap ada, kita juga mengalokasikan waktu bagi Anggota Komisi II untuk berkunjung ke dapilnya. Jadi rapat tetap jalan, urusan legislasi terus kita bahas, urusan anggaran tetap kita selesaikan dan pengawasan terus berjalan dengan baik, serta kerja anggota di dapilnya tetap jalan,” terang Zainudin



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Melihat catatan ke belakang, dimana tahun 2015, 2017, dan 2018 Indonesia melakukan penyelenggaraan Pilkada serentak, menurut Zainudin itu adalah ranah fungsi legislasi Komisi II DPR RI. Dalam kurun waktu tersebut, Komisi II DPR RI juga telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang Pemilu.

“Tadinya itu terdiri dari 3 undang-undang. Yakni UU tentang Pilpres, UU tentang Pileg dan UU tentang Penyelenggara Pemilu, kemudian disatukan menjadi satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Di penghujung masa jabatan ini, ia juga mengajak segenap Anggota Komisi II DPR RI tetap fokus pada apa yang

Foto: Jaka/hr

## Tiga RUU Komisi III Rampung Tahun Depan

**Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kini sedang dibahas Komisi III DPR RI segera rampung tahun depan. Ketiganya adalah RKUHP, RUU Jabatan Hakim, dan RUU Mahkamah Konstitusi (MK).**

**Walau akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 disibukkan dengan kampanye Pilpres dan Pileg, setidaknya ada empat bulan yang tersisa untuk menyelesaikan tiga RUU tersebut.**



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik

Foto: Azka/hr

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8). RKUHP yang sebelumnya diyakini akan rampung akhir tahun ini, kemungkinan baru bisa rampung pada tahun depan, lantaran ketua tim Panja dari pemerintah Enny Nurbaningsih sudah menjadi hakim konstitusi menggantikan Maria Farida yang pensiun. Jadi, butuh waktu dan adaptasi lagi untuk menunjuk ketua tim dari pemerintah.

Kekosongan ketua tim Panja dari pemerintah untuk RKUHP ini tentu menghambat kerja pembahasan RKUHP. “Saya tidak yakin RKUHP disahkan akhir

tahun ini. Ketua Tim Panja Pemerintahnya Prof. Enny Nurbaningsih sudah dilantik menjadi hakim konstitusi. Pemerintah harus memilih ketua tim baru,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Erma menilai, secara substansi dalam RKUHP masih ada pasal-pasal yang pemerintah sendiri tampaknya tidak percaya diri. Misalnya, permintaan KPK untuk menarik pasal-pasal tindak pidana korupsi (Tipikor) dari RKUHP. Pemerintah masih tarik ulur soal Tipikor.

Padahal, DPR dan pemerintah sebelumnya sepakat perlu ada reformasi sistem peradilan pidana. Reformasinya adalah menjadikan KUHP sebagai konstitusi dasar untuk sistem peradilan pidana.

“Saya menginginkan RKUHP ini tetap memasukkan Tipikor sebagai bagian RKUHP. Sementara Presiden sendiri masih tarik ulur saat bertemu KPK. Presiden sedang bentuk tim antara istana dan KPK. Jadi, Presiden belum percaya diri dengan itu,” tutur Erma.

Sementara RUU Jabatan Hakim ingin batasi usia hakim agung. Sebetulnya semakin tua usianya, semakin bagus putusannya, seperti di Amerika yang hakim agungnya berusia 90 tahun mampu memberi putusan yang bagus dan adil.

telah diamanahkan masyarakat. “Kita juga harus memberikan kado terindah bagi DPR yang pada tanggal 29 Agustus 2018 nanti akan berulang tahun ke-73,” tambahnya.

Ia yakin, pihaknya akan tetap konsentrasi pada dua hal, yaitu pemilu dan tentang pertanahan. Setiap masa sidang biasanya, Komisi II DPR RI menerima masukan dari permasalahan pertanahan yang ada. Kemudian permasalahan tersebut akan dikirim langsung ke Kementerian/ Lembaga yang membidangi dan sesegera mungkin duduk dan dibahas bersama antara Komisi II DPR RI dengan mitra terkait.

“Kita ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia juga bagi DPR. Dalam waktu yang singkat ini, kita terkonsentrasi pada Pileg dan Pilpres. Kemudian yang kedua tentang pertanahan. Kita tidak mau melebar kemana-mana, karena menyebabkan tidak fokus dan tidak bisa dilaksanakan,” pungkas politisi dapil Jawa Timur ini. ■

es/sf

“Pertanyaannya, banyak hakim agung kita yang sudah sakit-sakitan dan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa memutuskan. Hanya di Indonesia, hakim agung bisa ketemu makan malam dengan keluarga terpidana. Main golf dengan pengacara terpidana. Jadi, kita sekarang sedang merancang RUU Jabatan Hakim yang mengatur jabatan hakim dari hulu ke hilir,” paparnya lagi.

Terakhir, RUU MK merupakan revisi atas UU MK yang sekarang masih berlaku. Untuk mengusulkan sembilan hakim konstitusi, tiga lembaga, baik DPR RI, pemerintah, dan MA mendapat kuota tiga kandidat hakim. Hanya saja Erma berharap, dari tiga lembaga itu, ada hakim perempuan yang diusulkan untuk mengawal perkara menyangkut hak-hak perempuan.

Yang dipertanyakan Erma, kandidat hakim konstitusi dari MA selama ini tidak jelas bagaimana memunculkan para kandidatnya. Sementara DPR RI mengusulkannya lewat uji kelayakan dan kepatutan. Dan pemerintah sendiri menyaringnya lewat seleksi ketat. Erma menyangsikan netralitas hakim konstitusi usulan MA. Ini jadi masalah tersendiri. Di sinilah titik krusial pentingnya Komisi III DPR RI membahas RUU MK. ■ mh/sf

## Komisi X Apresiasi Peningkatan Anggaran Pendidikan



Foto: Kresno/hr

Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto

**Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto mengapresiasi meningkatnya anggaran untuk pendidikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, sebesar Rp487,9 triliun dari sebelumnya Rp444,1 triliun.**

“Saya sungguh mengapresiasi atas meningkatnya anggaran pendidikan. Sebab, jika ini terjadi, maka mutu pendidikan kita akan semakin baik,” ungkap Djoko usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2019 oleh Presiden Joko Widodo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Terlebih, lanjut politisi Partai Demokrat itu, dalam dunia pendidikan masih banyak yang perlu diperbaiki. Mulai dari fasilitas pendidikan dasar hingga menengah yang masih minim, serta tenaga pendidik yang jumlahnya masih kurang, mencapai 990 ribu.

“Anggaran dinaikkan ini kita bisa berbuat banyak untuk meningkatkan

mutu pendidikan. Saya berharap di tahun politik ini, mudah-mudahan yang disampaikan Presiden ini bukan janji, tetapi realistis,” tandasnya.

Dalam Rapat Paripurna RAPBN 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, untuk 2019 anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun.

Jumlah itu naik 9,86 persen dibandingkan tahun 2018 mencapai Rp444,1 triliun, atau meningkat 38,1 persen dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014.

Untuk meningkatkan kualitas SDM yang dipupuk dengan pendidikan yang baik, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui Program Indonesia Pintar. Bantuan juga diberikan kepada 471,800 mahasiswa melalui beasiswa Bidik Misi. ■ rnm/sf



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyerahkan obor Asian Games 2018 kepada Anggota DPR RI Bara K. Hasibuan, disaksikan Anggota DPR RI dan Pejabat Setjen dan BK DPR RI

Foto: J. Jayadi/hr

## Bara Hasibuan: Bawa Obor Asian Games Adalah Suatu Kehormatan

**Anggota Komisi VII DPR RI Bara Krishna Hasibuan merasa terhormat setelah didaulat sebagai pembawa obor bersama Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto pada perhelatan kirab obor (torch relay) Asian Games 2018. Bara berkesempatan membawa obor Asian Games dari Kompleks Parlemen ke Manggala Wanabakti.**

“Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi yang telah diberi kepercayaan oleh Ketua DPR, untuk mewakili DPR bersama Pak Utut pada kirab obor Asian Games 2018 ini,” terang Bara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini berpesan kepada seluruh masyarakat agar menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Indonesia juga mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain yang sudah lebih dulu maju di Asia.

“Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta dan Palembang ini merupakan suatu berkah bagi bangsa Indonesia. Dengan menjadi tuan rumah yang baik, kita tunjukkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah bangsa yang maju, menghargai etika dan moral,” tegas Bara.

Legislator dapil Sulawesi Utara ini berharap agar kontingen Indonesia yang ambil bagian pada Asian Games 2018 mampu mengukir prestasi yang membanggakan.

Kompleks Parlemen menjadi salah satu rute yang dilewati kirab obor (torch

relay) Asian Games 2018. Obro dibawa oleh petinju nasional Indonesia Chris John yang diiringi oleh ratusan pelari memasuki Kompleks Parlemen. Selanjutnya obor diserahkan Chris Jhon kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di selasar tangga Gedung Nusantara DPR RI.

Kemudian Ketua DPR RI menyerahkan obor kepada Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto yang kemudian berlari menuruni anak tangga Gedung DPR RI hingga gerbang utama.

Dari gerbang tersebut, Anggota DPR RI Bara Hasibuan diiringi beberapa pejabat Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI serta ratusan pelari membawa obor Asian Games berlari keluar Kompleks DPR RI hingga depan gedung Manggala Wanabakti untuk diteruskan hingga detik-detik pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. ■ es/sf

# Komisi V Dukung Percepatan Pembangunan di Lombok

**Komisi V DPR RI berjanji kepada seluruh masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk memberi dukungan agar secepatnya dilakukan pembangunan kembali terkait sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang luluh lantak pasca bencana gempa tektonik di Lombok dan sekitarnya.**

**H**al itu diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau lokasi terparah pasca gempa, Lombok Utara, NTB, Kamis (23/8). Dalam kunjungan yang diterima langsung oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar di tenda pengungsian, Komisi V DPR RI juga menemui sejumlah korban. Tenda pengungsian ini disulap menjadi kantor sementara, dikarenakan kantor bupati turut ambruk karena gempa.

Fary menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi serta berkomitmen dengan mitra kerja dalam rapat sebelum melakukan tinjauan ke lokasi bencana. Politisi Partai Gerindra tersebut juga berharap masyarakat sekitar dapat turut serta berperan mewujudkan kembali pembangunan pasca gempa.

“Kami sudah melakukan rapat sebelumnya dengan mitra kerja Komisi V untuk berkomitmen sesegera mungkin mewujudkan kembali pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas umum di Lombok. Laporan dari Kementerian Perhubungan baik itu Dirjen Darat, Laut, dan Udara bahwa sudah ada catatan kerusakan dan akan diperbaiki secepatnya. Kami berharap masyarakat setempat ikut berharap dan berpikir positif terhadap masa depan kita semua,” harapnya.

Politisi dapil NTT itu memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan memberikan dukungan secara politis dalam rangka melakukan pendataan-pendataan dan juga langkah-langkah strategis untuk pemulihan yang berkaitan dengan infrastruktur yang ada.

“Catatan kami kepada Kementerian PUPR bahwa ada cukup banyak rumah-rumah yang akan dibantu dan dibangun bersama BNPB. Kita memberikan catatan bahwa supaya rumah-rumah yang dibangun itu adalah rumah-rumah yang benar-benar rumah tahan gempa dan juga memperhatikan *local wisdom*-nya,” tuturnya.



Tim Kunker Komisi V DPR RI menyerahkan bantuan kepada Bupati Lombok Utara untuk korban gempa Lombok

Sebagaimana diketahui, gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) melanda Lombok pada akhir Juli lalu. Kemudian pada pertengahan Agustus lalu, terjadi gempa lagi berkekuatan 6,9 SR. Selain itu, juga terjadi ratusan gempa susulan.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencatat, hingga Kamis (23/8), gempa ini mengakibatkan 555 korban meninggal dunia dan 390.529 jiwa penduduk mengungsi. Saat ini, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Inpres Penanganan Gempa Lombok.

Kunjungan kerja ini juga diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Yoseph Umarhadi dan Henky Kurniadi (F-PDI Perjuangan), Hamka B. Kady (F-PG), Nurhayati (F-PPP), dan Soehartono (F-NasDem).

**Catatan kami kepada Kementerian PUPR bahwa ada cukup banyak rumah-rumah yang akan dibantu dan dibangun bersama BNPB. Kita memberikan catatan bahwa supaya rumah-rumah yang dibangun itu adalah rumah-rumah yang benar-benar rumah tahan gempa dan juga memperhatikan *local wisdom*-nya**

Kemudian Gatot Sudjito (F-PG), Ridwan Bae (F-PG), Subarna (F-Gerindra), Jhoni Allen Marbun (F-PD), Jhon Siffy Mirin (F-PAN), dan Nurhasan Zaidi (F-PKS). ■ eps/sf

# Komitmen Pembangunan Infrastruktur Harus Diimbangi Pembangunan SDM

**Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate memberikan tanggapan atas Pidato Presiden Jokowi terkait RAPBN 2019 beserta Nota Keuangannya. Menurutnya, struktur APBN 2019 harus dapat melanjutkan komitmen Jokowi terkait pembangunan infrastruktur. Meski demikian, ia juga mengingatkan agar pemerintah juga harus fokus dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju generasi lebih berdaya saing global.**



Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G. Plate

Foto: Iwan/hr

“ Saya ingatkan agar pemerintah tetap menekankan APBN 2019 pada pembangunan SDM dan tetap melanjutkan pembangunan belanja modal untuk infrastruktur,” ujar Johnny usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019 dengan agenda Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2019, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Politisi Partai NasDem ini juga mengingatkan, jangan sampai visi baik pembangunan infrastruktur justru membuat defisit transaksi berjalan

semakin membengkak karena bahan baku banyak berasal dari impor. Sehingga harus dilakukan secara selektif.

Ia juga mengatakan bahwa tantangan ekonomi 2019 masih dipenuhi sentimen eksternal. Dengan begitu, struktur APBN 2019 harus disusun untuk bisa mengantisipasi dampak dari sentimen dari gejolak ekonomi global. “Pasti tekanan kali ini di situasi seperti perang dagang, dimana tekanan eksternal begitu besar,” ujarnya.

Pemerintah, harus mampu menghadapi ini dengan mempersiapkan kemampuan SDM yang berkualitas.

“Pembangunan manusia harus dilakukan. Bukan baru sekarang tekanannya. Tapi, tiap tahun ada tekanan. Kebetulan tahun politik juga, jadi pembangunan manusia dalam rangka demokrasi lebih baik harus diprioritaskan,” ujar politisi dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) I ini.



Foto: Kresno/hr

Anggota Komisi XI DPR RI Romahurmuziy

## Pidato Presiden Dinilai Gugah Nasionalisme

**Anggota Komisi XI DPR RI Romahurmuziy menilai pidato Presiden Joko Widodo di depan Rapat Paripurna DPR RI cukup impresif karena disampaikan dengan gaya yang lebih baru. Termasuk menggunakan *gimmick-gimmick* milenial, karena melibatkan video-video yang *up to date* dan menampilkan pencapaian pembangunan selama empat tahun terakhir.**

“ Saya kira apa yang disampaikan Presiden bukan hanya sekedar menggugah nasionalisme kita dengan kalimat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tetapi juga menyampaikan jargon kerja nyata,” ungkapnya usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Mas Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Menanggapi merosotnya nilai tukar rupiah, Romy, sapaan akrabnya mengatakan, hal itu terjadi di semua regional. Bahkan Turki sejak Januari sampai dengan akhir pekan lalu nilai mata uangnya terdepresiasi 87 persen. Kalaupun ada langkah balik yang dilakukan Presiden Erdogan dengan mombokot produk dan menaikkan kurs lira, tetapi dibanding kurs awal tahun masih 45 persen.

Diketahui, Presiden Joko Widodo memberikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2018 dan Pidato Kenegaraan HUT ke-73 Kemerdekaan RI dan Pidato Pengantar RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018-2019.

Hadir pada sidang tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Kabinet Kerja, perwakilan negara-negara sahabat, Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dan Presiden ke-5 Megawati Sukarnoputri, serta mantan wakil presiden Tri Sutrisno dan Boediono.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyinggung kualitas pembangunan manusia yang terus membaik. Meski mengalami peningkatan, hal ini perlu digenjut agar pembangunan manusia bisa lebih tinggi lagi dari capaian yang ditetapkan.

“Kualitas kehidupan manusia Indonesia empat tahun terakhir terus membaik. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017,” kata Jokowi.

Beberapa upaya untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia telah dilakukan seperti pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar yang pada 2017 sudah mencapai 20 juta peserta didik serta penyaluran program Beasiswa Bidik Misi bagi mahasiswa. ■ hs/sf

“Rupiah kita masih baik-baik saja, meski terjadi penurunan. Tetapi akan meningkatkan daya saing relatif ekspor kita. Justru para eksportir diharapkan melakukan penetrasi ke pasar-pasar non tradisional,” tegas politisi PPP ini.

Menurut Romy, sejumlah analisis memang sudah memproyeksikan rupiah akan bertengger pada angka yang sekarang Rp14.600 sampai akhir tahun, meski itu meleset dari asumsi APBN 2018.

Tapi sesungguhnya setiap penurunan Rp100 dari dolar memberi efek netto terhadap APBN sekitar Rp300 miliar surplus.

“Dalam konteks ini, karena ini merupakan fenomena regional, kita tidak perlu khawatir, meski tidak berarti lengah. Apalagi cadangan devisa cukup, fundamental ekonomi baik dan inflasi cukup terkendali, serta pertumbuhan ekonomi masih diatas 5 persen,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah, yang juga Ketua Umum PPP ini. ■ mp/sf

# BUMN Perbankan Seharusnya Jadi Agen Pembangunan

**Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf mengkritisi kinerja BUMN Perbankan yang dirasa kurang berpihak kepada perusahaan-perusahaan kecil. BUMN Perbankan tugasnya tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga sebagai agen pembangunan atau *agent of development*. BUMN juga memiliki tugas meningkatkan perusahaan kecil menjadi perusahaan menengah, dan mendorong usaha ekonomi menengah menjadi besar dan seterusnya.**

**K**ritik tersebut dilontarkan Mustofa saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deputi Kementerian BUMN yang juga dihadiri oleh para Direktur Utama BUMN Perbankan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/8).

“Bapak-bapak harus berusaha bagaimana menekan biaya-biaya yang seharusnya tidak keluar sehingga dana yang dipinjamkan itu bisa murah dan terjangkau bagi rakyat, apalagi disaat kondisi perekonomian sedang terpuruk seperti ini,” tegas Mustofa.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pemilihan konsumen juga penting. Jangan hanya berpihak kepada kelompok-kelompok atas atau konglomerat kapitalis, yang notabene tanpa bantuan perbankan pun mereka tetap bisa berkembang dengan baik.

Ia mencontohkan penyaluran kredit terhadap usaha infrastruktur

yang luar biasa besarnya. Bila dikatakan itu adalah anjuran pemerintah, Mustofa mengingatkan bahwasanya para direktur perbankan adalah seorang profesional yang memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab profesionalisme.

“Kalau ada usulan-usulan pemerintah untuk melakukan pembiayaan terhadap BUMN yang mana ini *project*-nya tidak *visible*, harusnya ditolak. Minta yang lebih *visible* dan lebih bermanfaat bagi rakyat,” saran politisi dapil Jatim itu.

Mustofa menganalogikan bila Rp1 triliun itu bisa dirasakan oleh seribu orang dan adalagi dana Rp1 triliun yang bisa dirasakan oleh dua juta orang. Sebagai orang profesional, ia meminta para dirut BUMN Perbankan untuk berbicara dan berdiskusi dahulu kepada pemerintah sebelum mengambil kebijakan demi kesejahteraan masyarakat luas. ■ es/sf



Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf

# Pemerintah Harus Atasi *Illegal Drilling* di Jambi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung mengatakan bahwa pemerintah harus bisa mengatasi masalah *illegal drilling* atau pengeboran minyak secara ilegal yang terjadi di Provinsi Jambi. Menurut Tamsil, karena hal itu merupakan salah satu sumber yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi Pertamina EP Asset 1 Field Jambi.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung berdiskusi dengan Direksi PT. Pertamina Asset 1 Field Jambi

“ Kita berkesimpulan bahwa perlu segera ada rapat dengan Kementerian ESDM serta menyertakan juga Komisi pengawas SKK Migas, dan di dalamnya ada unsur-unsur kementerian lain, termasuk juga Kapolri yang bisa menyelesaikan masalah *illegal drilling*,” ucap Tamsil saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jambi, Kamis (23/8).

Dikatakannya, jika persoalan itu bisa terselesaikan, maka satu permasalahan besar sudah bisa diatasi. “Masalah *illegal drilling* ini bukan hanya merugikan Pertamina dalam produktivitasnya, tetapi juga pada kerusakan lingkungan. Ini semua mempunyai implikasi yang bisa menelan korban,” tandas Tamsil.

Politisi Fraksi PKS itu juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan antara Komisi VII DPR RI dengan pihak Pertamina, SKK Migas, dan Walikota Jambi, ada usul yang menarik dari Walikota, yakni agar masalah *illegal drilling* tersebut dilegalkan saja.

“Ada *pilot project* yang sudah dilakukan oleh Pertamina EP, yakni adanya kerja sama operasional antara koperasi Pertamina dengan koperasi masyarakat. Bahkan bagi hasilnya pun sudah ditentukan yaitu 70 persen untuk masyarakat. Tentu hal itu bisa memberikan keuntungan yang cukup signifikan,” kata Tamsil.

Politisi dapil Sulsel itu menilai, kalau hal itu bisa dilakukan, maka dimungkinkan kondisinya akan menjadi

lebih baik.

“Semuanya nanti akan kita bicarakan, dan diharapkan ada keputusan dalam waktu dekat di dalam pembicaraan dengan Komisi Pengawas SKK Migas,” ujarnya.

Usai melihat kinerja yang dilakukan oleh Pertamina EP Asset 1 Field Jambi, Tamsil menyatakan, pihak Pertamina EP Asset 1 Field Jambi sudah luar biasa dalam mengoptimalkan dan mengupayakan peningkatan produksinya.

“Kita sudah menyaksikan secara langsung kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan hasil produksi yang dilakukan oleh pihak Pertamina EP di wilayah Kenali Asam Atas Jambi ini,” pungkasnya. ■ dep/sf



# Anggaran Pendidikan 20 Persen Hanya Formalitas

**Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, anggaran pendidikan sebesar 20 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya formalitas. Jika ditelusuri, bahkan menurut Neraca Pendidikan Daerah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), banyak kota dan kabupaten yang mengalokasikan kurang dari 10 persen APBD untuk pendidikan.**



Foto: Oji/hr

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih

Fikri mengatakan, sebetulnya pendidikan di Indonesia memiliki payung yang kuat dalam mendukung anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD, demikian pula dengan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun ia menyayangkan, anggaran 20 persen tersebut tidak sepenuhnya berada pada kementerian yang mengurus pendidikan.

“Dari Rp440 triliun di APBN sekarang, hanya Rp40 triliun ke Kemendikbud, Rp40 triliun ke Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dan Rp63 triliun di Kementerian Agama (Kemenag). Artinya, 2/3 anggaran pendidikan banyak untuk K/L lain. Bahkan Rp200 triliun berupa transfer daerah,” jelas Fikri dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin (20/8).

Dengan kondisi tersebut, menurut politisi PKS itu, wajar bila dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP),

terdapat empat standar yang kategorinya sangat buruk menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Fikri mengemukakan, dua SNP yang paling menonjol adalah sarana prasarana dan pendidikan dan tenaga kependidikan. “Tidak ada satu pun daerah yang tidak mengeluhkan dua standar ini,” tandasnya.

Sarpras misalnya, dari 1,8 juta ruang kelas yang ada, 1,3 juta dinyatakan rusak dan hingga kini pemerintah hanya memperbaiki sedikit saja, hanya yang rusak berat sebesar 250 ribu. Itu pun tahun 2018 ini hanya dialokasikan 25 ribu saja, sisanya diserahkan ke daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fikri juga menguraikan mengenai persoalan guru yang mengalami kekurangan 900 ribu, saat ini belum ada skema pemenuhan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan alasan klasik, yakni anggaran belum tersedia.

Sehingga permasalahan ini diserahkan kepada sekolah. Namun di sisi lain, guru-guru itu tidak boleh diangkat menjadi honorer, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005.

Menurut politisi dapil Jawa Tengah itu, persoalan pendidikan ini karena bergantinya kebijakan secara berulang-ulang tiap terpilih pemerintahan yang baru. Begitu juga dengan kurikulum yang ganti setiap menteri baru ditunjuk.

“Hal ini karena kita belum memiliki *grand design* atau Rencana Induk Pendidikan yang jelas. Dengan rencana induk yang jelas, amanat konstitusi mengenai alokasi 20 persen anggaran bagi pendidikan tidak hanya formalitas belaka,” tandas Fikri. ■ hs/sf



**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI  
SERTA SETJEN DAN BK DPR RI  
Mengucapkan**

**SELAMAT HARI RAYA**

**Idul Adha**  
**1439 H**





Foto: Jayadi/hr

Sekretariat Jenderal DPR RI Indra Iskandar (tengah) menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah di Masjid Baiturrahman

## Setjen DPR Gelar Penyembelihan Kurban

**Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah di halaman Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8).**

Sebanyak 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing merupakan hewan kurban dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Pimpinan MPR RI Ahmad Basarah dan EE Mangindaan serta Korpri DPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengharapkan, ke depannya pelaksanaan penyembelihan hewan

kurban bisa dipersiapkan lebih baik lagi. Sehingga jumlah hewan kurban bisa lebih banyak untuk diberikan kepada mustahiq (golongan yang berhak menerima zakat).

“Jika hari ini hewan kurban berasal dari Pimpinan DPR, MPR dan DPD RI dan Fraksi Partai Golkar, diharapkan tahun depan dengan persiapan sejak jauh-jauh hari, bisa ditingkatkan menjadi seluruh fraksi, sesuai

**Setiap umat muslim berbagi kepada saudara-saudara yang kurang mampu, sehingga ikut merasakan kenikmatan daging kurban yang disampaikan para penyumbang dengan keikhlasannya**

perwakilan partai di DPR,” kata Indra, saat memberikan sambutan.

Lebih lanjut Indra mengatakan, Hari Raya Kurban adalah memperingati penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim, sebagai ukuran ketaqwaannya kepada Allah SWT. Atas kehendak Allah SWT pula, Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, yang kemudian atas kekuasaan-Nya, Nabi Ismail diganti dengan seekor domba.

Dengan peristiwa itu, lanjut Indra, bisa diambil sebuah hikmah yang baik bahwa setiap manusia hendaklah rela berkorban baik dengan harta benda dan jiwa raga, bila itu diperlukan baik untuk kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan khususnya untuk agama.

“Apakah kita sudah mengukur kadar rasa pengorbanan pada diri kita masing-masing, apakah kita sudah siap kehilangan harta dan tenaga kita jika ada seseorang memerlukan pertolongan kita. Apakah kita siap berkorban apabila negara kita membutuhkan dan apakah siap kehilangan harta dan tenaga apabila agama kita membutuhkan. Tentu jawabannya ada dalam diri kita masing-masing,” sebutnya.

Dengan menyerahkan hewan kurban itu pula, lanjut Indra, setiap umat muslim berbagi kepada saudara-saudara yang kurang mampu, sehingga ikut merasakan kenikmatan daging kurban yang disampaikan para penyumbang dengan keikhlasannya. Tentu saja hal itu adalah sebuah amal baik yang akan mendapatkan imbalan di akhirat nanti.

Indra juga berharap, dengan merayakan Idul Adha hendaknya bukan sifat rela berkorban saja yang diteladani, juga sifat ketaqwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang harus diteladani dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita juga kita dituntut untuk berkorban tidak hanya pada hari raya ini saja, tetapi dalam kehidupan keseharian. Dengan peringatan ini mari kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT,” tutup Indra.

Dalam kesempatan itu, hewan kurban secara simbolis diserahkan kepada panitia kurban. Acara penyembelihan kurban itu juga dihadiri sejumlah pejabat Setjen dan BK DPR RI, diantaranya Deputi Administrasi Mardian Umar, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapari, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Makmur, Kepala Biro Umum Djustiawan Widjaya, dan sejumlah pejabat dan pegawai Setjen dan BK DPR RI. ■ mp/sf

## Pemerintah Diharapkan Tidak Impor Beras Lagi

**Kebijakan impor beras diharapkan tidak dilakukan lagi, setidaknya dikendalikan untuk menjaga produksi dan harga beras nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2019 dan Nota Keuangannya juga ingin mengendalikan impor dan bahkan meningkatkan nilai ekspor.**



Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani yang ditemui usai Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8), menyatakan tidak setuju dengan impor beras. Untuk meningkatkan produksi beras nasional, pemerintah harus memberi bantuan alat pertanian kepada para petani termasuk subsidi pertanian lainnya yang bisa dinikmati petani.

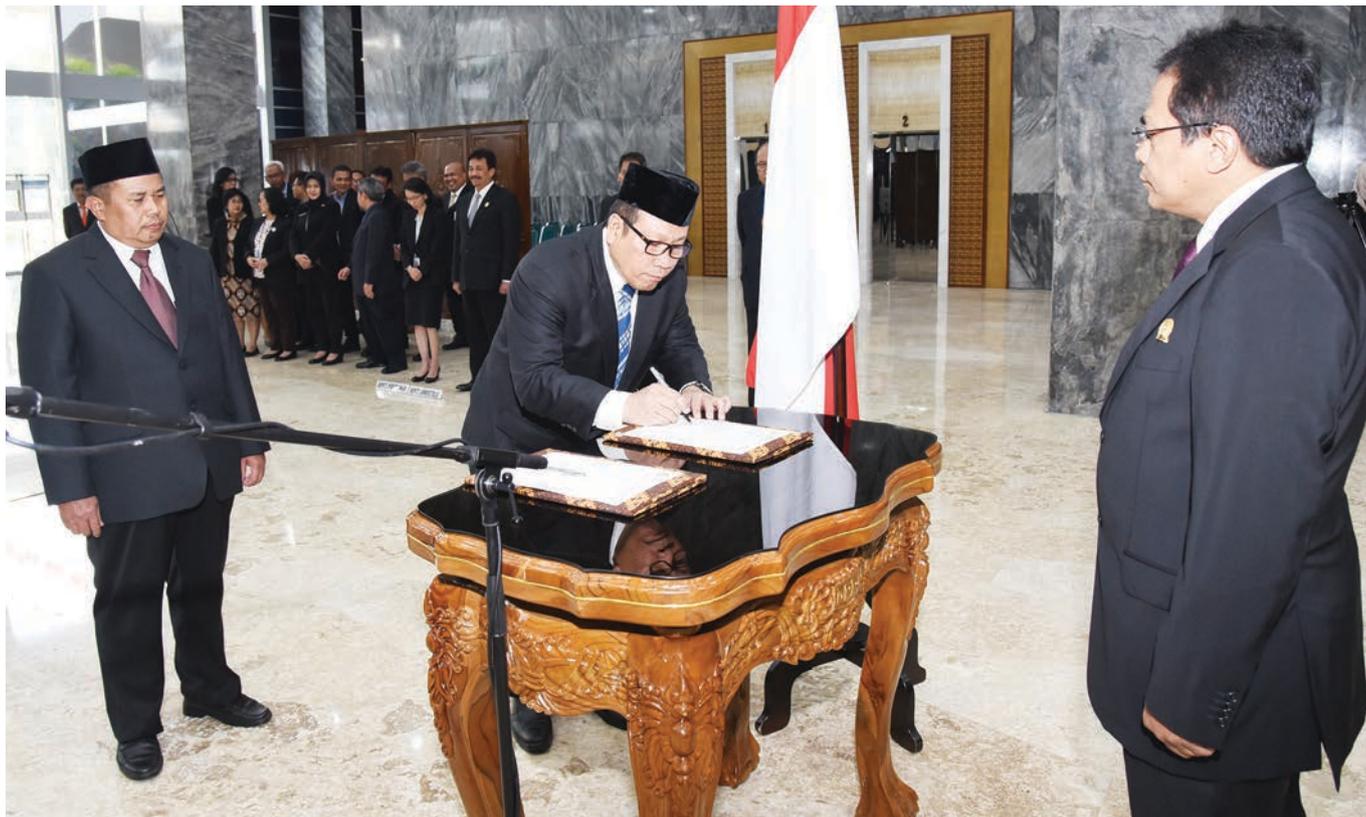
“Saya tidak setuju impor. Saya setuju bila hasil pertanian meningkat, pemerintah harus beri subsidi kepada petani. Pemerintah harus punya terobosan. Jangan memberatkan

rakyat. Yang muda-muda semangat lagi membangun pertanian di desa,” ujar Endang, dengan menyerukan para pemuda untuk membangun desanya dengan bertani, sehingga diharapkan tak ada lagi impor beras.

Sementara dimintai komentarnya soal pidato Presiden Joko Widodo, Endang mengatakan, pidato Presiden luar biasa. Pidato memberi harapan dan pencerahan kepada rakyat Indonesia. Banyak fasilitas infrastruktur sudah dibangun yang tentu memudahkan mobilitas masyarakat. “Banyak program pemerintah yang sudah terealisasi. Kita apresiasi atas capaian Presiden Jokowi,” imbuh politisi Partai Golkar itu. ■ mh/sf

# 17 Pejabat Fungsional Risalah Setjen DPR Dilantik

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melaksanakan upacara pelantikan 17 pejabat fungsional baru Bagian Risalah, Setjen dan BK DPR RI. Pejabat tersebut terdiri dari Perisalah Legislatif Ahli Madya, Perisalah Legislatif Ahli Muda, Perisalah Legislatif Ahli Pertama, dan Asisten Perisalah Mahir.



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memimpin upacara pelantikan 17 pejabat fungsional baru Bagian Risalah, Setjen dan BK DPR RI

Foto: Jayadi/hr

Sesuai pelantikan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8), Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan bahwa dalam satu organisasi harus terus dilakukan penyegaran dan peningkatan kinerja. Ia berujar bahwa tim penilai kinerja akan terus berupaya menjaring para karyawan yang bertalenta.

“Dalam satu organisasi harus terus menerus kita pertimbangkan adanya penyegaran, peningkatan kinerja. Kalau ada yang secara alamiah pensiun itu harus diisi. Kalau ada satu unit kerja yang harus diperkuat, kita jaring teman-teman yang punya talenta dan *track record* yang cukup untuk menempati jabatan tersebut,” ujar Indra.

Ia menambahkan bahwa Bagian Risalah merupakan salah satu jabatan

spesifik yang hanya dimiliki oleh lembaga-lembaga legislatif, sehingga diharapkan para pejabat yang dilantik untuk bekerja sebaik-baiknya.

“Perisalah ke depan akan digunakan untuk alat strategis seperti *judicial review*. Kemudian jika ada suatu hal yang harus diklarifikasi dengan lembaga hukum, semisal KPK atau pengadilan, atau lembaga hukum lain, itu akan dilihat laporan singkat atau risalah yang pernah ada dalam tiap persidangan. Juga untuk hal-hal yang sifatnya akademis,” tegasnya.

Terakhir ia tidak lupa berpesan kepada seluruh pegawai Setjen dan BK DPR RI untuk terus berpacu dan belajar memperbaiki diri untuk perbaikan organisasi di era digital ini.

“Saya menekankan kepada teman-teman untuk bekerja secara normatif.

Selalu bekerja lebih baik lagi, karena tantangan kita ke depan makin berat. Semua lembaga publik dan lembaga negara saat ini sedang berpacu untuk memperbaiki diri dengan tantangan zaman di era digital,” pungkasnya.

Ke-17 pejabat fungsional yang dilantik itu yakni Agus Salim, Nurani Bodroini, Uli Sintong Siahaan, Mitra Anindyarini sebagai Perisalah Legislatif Ahli Madya. Kemudian, Iwan Kurniawan, dan Moh. Riza sebagai Perisalah Legislatif Ahli Muda.

Berikutnya, Firosa Siresia dan Wanti Devi Setiawati sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama serta Irni Sismartika, Maya Dwiyantri, Ana Zuraidah, Siti Asita, Novi Resnawati, Fitri Andrijani, Suhadin, Wilis, dan Titiek Endartini sebagai Asisten Perisalah Mahir. ■ eps/sf

# Ittama DPR Optimis Gapai Target Penilaian Reformasi Birokrasi

**Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Setyanta Nugraha optimis dapat mencapai target penilaian Reformasi Birokrasi tertinggi di angka 76, mengingat kenaikan 6 poin sangat berarti bagi pengajuan kenaikan tunjangan kinerja (tunkin) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Setjen dan BK DPR RI.**



Foto: Oj/hr

Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Setyanta Nugraha

“ Kita semua harus optimis. Dan itu harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Artinya bahwa semua kegiatan itu dilakukan secara akuntabel dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapny usai Evaluasi Kementerian PAN-RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen dan BK DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/8).

Totok, biasa ia disapa juga menjelaskan, untuk menggapai angka penilaian tersebut, ia kembali menjabarkan *tagline* dirinya yaitu komitmen bersama, tanggung jawab kolektif, dan minimal 6 poin kenaikan. Yang artinya adalah untuk menggapai angka penilaian reformasi birokrasi yang ditargetkan dibutuhkan komitmen bersama, kemudian tanggung jawab kolektif, yaitu tidak dibebankan kepada

individu atau unit kerja tertentu. Dan hasil akhir dari tanggung jawab kolektif adalah minimal mendapatkan kenaikan 6 poin.

“Harapannya ketika kita sudah minimal 6 poin, maka kita nanti akan mengajukan tambahan tunkin. Karena syarat dari kenaikan tunkin itu adalah nilai dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Kalau sudah baik sekali, maka harapannya nanti kita bisa mengajukan kenaikan tunkin menjadi 80 persen, sekarang masih 70 persen, jadi kenaikan 10 persen. Itu memang bertahap, mudah-mudahan terwujud semua,” katanya.

Totok melanjutkan, penilaian tahun lalu Setjen dan BK DPR RI mendapatkan nilai di indeks 71 dengan kategori baik. Maka tahun ini dirinya memiliki target penilaian dengan kategori baik sekali di angka minimal 76, sehingga kekurangan 6 poin tersebut diharapkan dapat segera tercapai.

Dirinya juga telah mengarahkan seluruh Asesor, Penanggung Jawab termasuk para Biro-Biro atau Unit kerja yang memiliki *evidence* terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk dapat dicek satu persatu oleh Tim dari Kementerian PAN-RB, demi memastikan bahwa di sana betul-betul terdapat *evidence*.

Agenda Evaluasi Kementerian PAN-RB atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen dan BK DPR RI itu berpusat kepada pendalaman evaluasi terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi 8 area perubahan, *quick wins*, wilayah zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dari seluruh area tersebut yang dilihat oleh tim KemenPAN-RB adalah *evidence* atau bukti.

Terkait *evidence* atau bukti yang dilihat oleh tim KemenPAN-RB, Totok mengatakan bahwa *evidence* itu bisa berbentuk peraturan, pedoman, cara kerja SOP dan juga mekanisme kerja. “Yang intinya itu ke arah perbaikan, sehingga menumbuhkan kinerja yang lebih baik secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang juga Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI Asep Ahmad Saefulloh menjelaskan, akhir dari penilaian Reformasi Birokrasi di Setjen dan BK DPR RI tidak hanya berpusat kepada pengajuan kenaikan tunkin saja. Tunkin bukan menjadi hal yang utama, melainkan otomatis kompensasi, artinya tujuan dari penilaian ini adalah perbaikan tata kelola demi menjadikan birokrasi Setjen dan BK DPR RI menjadi birokrasi kelas dunia.

“Tujuannya adalah perbaikan tata kelola, bagaimana kita mengelola organisasi ini dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah *good government*, supaya kita bisa menjadi birokrasi kelas dunia. Karena kalau kita sudah menjadi birokrasi kelas dunia, kompensasinya biar orang semangat terus untuk meningkatkan kinerja tersebut. Jadi tunkin itu mengikuti, tujuannya perbaikan tata kelola,” tutupnya usai evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. ■ ndy/sf



Foto bersama Pimpinan dan pejabat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan peserta pendidikan dan pelatihan Kepimpinan Tingkat IV (Diklat Pimpat), Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI

## Pusdiklat Setjen dan BK DPR Selenggarakan Diklat Pejabat Eselon IV

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepimpinan Tingkat IV (Diklat Pimpat). Diklat kepemimpinan ini diperuntukkan bagi pejabat Eselon IV di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa kegiatan diklat tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI.



Foto: Kresno/Man

“Diklat Pimpat ini adalah semacam *pilot project* dan akan terus kita kembangkan ke depannya agar mencapai satu proses kediklatan yang ideal. Diklat Pimpat merupakan satu prasyarat jabatan Eselon IV,” ucap Indra di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/8).

Dikatakannya, karena ini menjadi suatu prasyarat jabatan, maka salah satu *output*-nya diharapkan nantinya dari setiap peserta diklat itu mampu menyiapkan satu proposal proyek perubahan di unit

Ia juga berpesan kepada para peserta diklat agar dapat mengikuti diklat dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggungjawab, agar kelak dapat menjadi pioner-pioner di unit kerjanya masing-masing.

Sementara itu, Kabid Pengembangan Program Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan LAN Hartoto menyatakan apresiasinya atas diselenggarakannya Diklat Pimpat itu. Menurutnya hal ini adalah bagian dari upaya persiapan ke depan untuk bisa diakreditasi.

kerjanya masing-masing.

“Itu salah satu tujuan utamanya. Sehingga bagaimana teman-teman peserta diklat ini bisa menumbuhkan inovasi-inovasi ‘Win’, yaitu menjadi salah satu metode di unit kerjanya masing-masing,” ujarnya.

Indra mengatakan, Reformasi Birokrasi di Setjen dan BK DPR RI adalah capaian satu keadaan dimana birokrasi di lingkungan Setjen dan BK DPR RI bisa menjadi lebih efisien dengan tingkat pelayanan yang prima.

“Semua upaya kediklatan ini harus diarahkan kepada situasi hulu dan hilirnya yang menyangkut pelayanan kepada Dewan dapat menjadi lebih baik lagi. Ada berbagai kriteria *leadership*, salah satunya yaitu para peserta diklat tersebut nantinya mampu menjadi pemimpin yang baik di unit insatnsinya masing-masing,” tutur Indra.

**Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi khususnya bagi pejabat Eselon IV, sehingga dapat mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja didalam pelaksanaan tugasnya**

“Pengembangan ke depan, *mindset* kita berubah, yakni melayani proses manajemen di Setjen dan BK DPR RI menjadi jauh lebih baik. Pengembangan pelatihan di Setjen dan BK DPR RI tidak hanya bersifat di dalam kelas, tetapi akan memperhitungkan *mindset*-nya dengan mengacu pada kemajuan informasi. Inovasi-inovasi yang dikembangkan itu diharapkan dapat men-*trigger* kinerja Setjen dan BK DPR dalam melayani,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI Rahayu Setya Wardhani juga menyampaikan bahwa saat ini Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI belum mempunyai akreditasi untuk menyelenggarakan diklat pimpinan.

“Dalam kesempatan ini, ada 41 pejabat Eselon IV yang belum mengikuti Diklat Pimpat, maka Pusdiklat meminta izin kepada LAN RI selaku pembina lembaga pemerintah untuk menyelenggarakan diklat Pimpat ini,” ucapnya.

Rahayu menambahkan, Diklat Pimpat ini akan diakreditasi agar Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan diklat Pimpat.

“Salah satu yang dalam proses adalah akreditasi untuk diklat rancangan peraturan perundang-undangan yang peminanya adalah Kemenkumham,” jelasnya.

Dari segi program serta sarana dan prasarana, Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI akan terus berusaha untuk mengembangkan pelaksanaan seluruh kegiatan peningkatan kompetensi bagi pegawai dilingkungan Setjen dan BK DPR RI.

“Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan inovasi khususnya bagi pejabat Eselon IV, sehingga dapat mengimplementasikan dan meningkatkan hasil kinerja didalam pelaksanaan tugasnya,” pungkasnya di sela-sela pembukaan diklat. ■ as/sf



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri sekaligus membuka acara *Lomba Stand Up Comedy* bertajuk "Kritik DPR" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/8). Foto : Arif/hr



Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto (foto kanan), saat Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/8). Foto : Andri/hr



Inspektur Utama DPR RI Setyanta Nugraha (foto kiri) saat memberikan sambutan pada 'Survei Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)', oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8). Foto : Oji/hr